

BAB III

IDEOLOGI POLITIK PARTAI GOLKAR

A. Ideologi Politik Partai Golkar

Pada tahun 1955 bangsa Indonesia mengukir sejarah dalam praktek demokrasi, dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung umum, bebas dan rahasia (luber). Pada masa tersebut, Indonesia menghadapi berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial maupun politik dengan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pemilu itu, sebanyak 28 partai politik turut serta menjadi kontestan pesta demokrasi tersebut.⁴⁷ Setelah berbagai kampanye yang ramai dan melelahkan, akhirnya muncul empat kekuatan partai politik terbesar yang sekaligus keluar sebagai “pemenang”. Partai politik tersebut adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dengan perolehan suara yang begitu besar jika dibandingkan partai-partai lain semisal Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Murba atau Partai Sosialis Indonesia (PSI) merupakan sebuah hal yang mengejutkan.⁴⁸

Kemenangan PKI ini merupakan ancaman bagi lawan politiknya, baik dari kalangan partai atau pun kelompok lain, khususnya militer.⁴⁹ Setelah tahun 1955

⁴⁷ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 84.

⁴⁸ *Ibid.*, 85

⁴⁹ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi, 2007), 461.

tersebut, Indonesia memasuki masa-masa kritis sekaligus menentukan. Hal ini ditandai dengan perdebatan-perdebatan sengit dalam merumuskan dasar negara, dan ketegangan fisik di berbagai daerah yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Hal ini karena sampai tahun 1959 berbagai kelompok yang berdebat di Majelis Konstituante tidak mampu menemukan jalan tengah sebagai suatu kompromi untuk menentukan undang-undang dan dasar negara. Dengan dekrit ini, Presiden membubarkan Majelis Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara, dan mengumumkan bahwa era demokrasi liberal telah berakhir dan saatnya bangsa Indonesia memasuki sebuah masa yang ia namakan sebagai demokrasi yang terkontrol, yaitu Demokrasi Terpimpin.⁵⁰

Salah satu doktrin terkenal dari era ini adalah *Nasakom* (Nasionalis, Agama dan Komunis). Politik Presiden Soekarno, terlihat cenderung memberi "ruang" yang cukup pada pemenang Pemilu tahun 1955, sehingga iklim politik tersebut menguntungkan PKI untuk mengembangkan kekuatannya. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di pihak militer (AD).⁵¹ Kekhawatiran ini sangat beralasan melihat PKI dengan berbagai organisasi *Onderbouw*-nya semakin tumbuh besar dan berpengaruh.⁵² Dengan berbagai strategi dan taktik mereka mencoba menghalangi perluasan pengaruh PKI. Salah satu strategi yang

⁵⁰ John Maxwell, *Soc Hok Gic, Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), 67-79.

⁵¹ Patmono Sk, dkk, *Golkar Baru dalam Fakta dan Opini-Buku I*, (Jakarta: Lembaga Studi Demokrasi, 2001), 15.

⁵² Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer-Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 13.

dilakukan oleh militer adalah membentuk atau mendukung berbagai organisasi tandingan bagi organisasi-organisasi *onderbouw* PKI sebagai upaya meredam tindakan PKI, yaitu misalnya Soksi (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), Gakari (Gerakan Karyawan Republik Indonesia), BPPK (Badan Pembina Potensi Karya), Kosgoro (Koperasi Simpan Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) serta menyponsori terbitnya surat-surat kabar seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.⁵³

Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno menjelaskan konsepnya untuk keluar dari Demokrasi Liberal. Presiden mengajak masyarakat dan elit politik untuk membentuk kabinet “Gotong Royong” yang mengikutsertakan empat partai besar termasuk PKI. Selain itu diperkenalkan badan baru yang dinamakan Dewan Nasional dengan perwakilan buruh, petani, pemuda dan wanita. Bahkan Presiden menyanggupi untuk memimpin dewan ini.⁵⁴ Berawal dari konsepsi ini dan didorong persaingannya dengan PKI yang semakin menajam, pada pertengahan 1960-an Jenderal Nasution dan beberapa orang rekannya membuat suatu rencana untuk membentuk Sekber Golkar, sebuah organisasi yang akan digunakan untuk memelihara kekuatan kelompok anti-komunis.⁵⁵

Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer, untuk mempersiapkan

⁵³ Patmono Sk, dkk, *Golkar Baru dalam Fakta dan Opini-Buku I*, (Jakarta: Lembaga Studi Demokrasi, 2001),16.

⁵⁴ Farchan Bulkhin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Pilihan Artikel Prisma* (Jakarta: LP3ES, 1991), 268.

⁵⁵ *Ibid.*, 269

“Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”. Pada 5 Agustus 1964, Presiden mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang berisi tentang syarat organisasi-organisasi yang boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Penpres ini mempersulit organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional.⁵⁶ Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan Karya mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh Penpres No. 193/1964.⁵⁷

Pada tengah malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi non-afiliasi berkumpul bersama menanda tangani piagam. Kemudian pada pukul 12 siang hari, 20 Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratigny (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.⁵⁸ Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat sebagai Sekber Golkar resmi berdiri.

B. Sejarah Ideologi Politik Partai Golkar

⁵⁶ Imam Pratigny, *Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar*, (Jakarta: Yayasan Bhakti, 1984), 91

⁵⁷ Perpres No. 193

⁵⁸ Leo Surya Dinata, *Golkar dan Militer-Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992),. 15

Golongan Karya (Golkar) memiliki akar sejarah yang panjang dalam perpolitikan Indonesia. Semangat awal pembentukan Golkar dilatarbelakangi upaya untuk membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mempertahankan ideologi negara Pancasila. Dengan semangat dan tujuan yang sama, membendung pengaruh PKI, berbagai eksponen anti-komunis berhimpun dalam wadah Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar menduduki peranan yang penting sebagai partai pemerintah. Golkar menjadi sebuah kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi dan Non sektarian. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan konsolidasi politik Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan pembangunan Orde Baru.⁵⁹

Golkar pertama kali terbentuk dengan nama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama, Golongan Karya), organisasi inilah yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Golkar. Sekber Golkar pertama kali terbentuk atas rencana dari Jenderal A. H. Nasution bersama rekan-rekannya di TNT pada Oktober 1964, pada mulanya ia adalah sebuah federasi yang begitu longgar yang tujuannya adalah mengimbangi PKI. Yang mana terdiri dari anggota Gerakan Tentara Pelajar, kelompok cendekiawan, dan tentara. Komponen-komponen Sekber Golkar terdiri dari ABRI dan tiga organisasi massa yang disponsori ABRI, yaitu Soksi (Sentra Organisasi

⁵⁹ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 40

Karyawan Swadiri Indonesia), Kosgoro (Koperasi Simpan Tabung Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong).⁶⁰

Baru setelah terjadinya kudeta 1965 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia maupun bagi Golkar sendiri. Dengan dihentikannya seluruh kegiatan PKI beserta antek-anteknya maka tumbanglah kekuasaan Orde Lama. Bersamaan dengan itu maka lahirlah Orde Baru. Peristiwa pemberontakan PKI 1965 berimbas sekurang-kurangnya pada dua simbol kekuatan politik orde sebelumnya, yaitu ditumpasnya PKI dan tamatnya kekuasaan Soekarno. Tergulingnya dua kekuatan tersebut berdampak pula pada perubahan struktur politik yang ada, seperti berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin. Bertolak dari peristiwa itulah era kejayaan Orde Baru di mulai.⁶¹

Hingga awal Orde Baru, tidak ada satu pun partai politik yang mewakili kepentingan militer. Partai-partai politik di masa lalu selalu mewakili kepentingan sipil. Kehadiran Golongan Karya di masa Orde Baru ini dapat dipandang sebagai realisasi dari keinginan para elite politik, yang dalam kurun pertama Orde Baru digantikan oleh ABRI ditambah teknokrat sebagai pengganti kaum sipil di masa Orde Lama, dalam rangka pembaharuan politik di Indonesia. Di lain pihak, berbarengan dengan itu kehadiran Golongan Karya, sebagai perpanjangan tangan

⁶⁰ Leo Surya Dinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1992), 14-16

⁶¹ Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), 42

ABRI di lembaga sipil, semakin mendesak kedudukan partai politik. Kenyataan menunjukkan pada mulanya semua atau setidaknya sebagian besar pimpinan teras Golongan Karya di masing-masing tingkat dipimpin oleh ABRI yang masih aktif di kesatuannya masing-masing. Baru di tahun-tahun berikutnya pimpinan tersebut diharuskan menanggalkan baju militernya dengan dipensiunkan terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke dalam Golongan Karya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Golongan Karya pada masa Orde Baru di dominasi oleh ABRI.⁶²

Pada perkembangan berikutnya, pada masa Orde Baru adanya kebijakan penciutan kontestan Partai Politik dan penyeragaman asas Partai. Jika pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai, pada pemilu 1971 diikuti 10 parpol, selanjutnya pada Pemilihan Umum 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Ini merupakan perkembangan dari gagasan fusi partai yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam salah satu konsideran UU No. 3/1975 mengenai Partai Politik dan Golkar disebutkan, “dengan adanya tiga, organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar partai-partai politik dan Golkar benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan proses pembangunan.”⁶³

⁶² Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 164

⁶³ Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*, 45-46

Sejak 1971, Golkar telah berubah dari sekedar sebuah federasi yang longgar untuk mengimbangi PKI menjadi sebuah partai politik yang digunakan untuk menjadi mesin pemilu. Golkar muncul sebagai organisasi politik dominan dalam pemilu 1971. Setelah itu, hal yang secara umum relatif sama juga terjadi pada, masa-masa pemilihan umum berikutnya. Terlebih setelah pada 16 Agustus 1982, Golkar selalu menjadi *Mainstream* yang tidak terkalahkan. Hal ini tentunya juga dilihat karena Golkar semenjak masa pemerintahan Orde Baru adalah merupakan partai'pemerintah, ditambah lagi militer merupakan kekuatan politik yang dominan di dalam Golkar dan juga, adanya tambahan kekuatan dari birokrat pada saat itu. Golkar juga selalu mendapat perlakuan istimewa pada pemerintahan saat itu dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya.⁶⁴

Di dalam kepengurusannya, juga telah banyak tokoh-tokoh politik nasional yang memimpin Golkar. Dan struktur kepartaiannya juga telah banyak mengalami perubahan sejak terbentuk sampai saat ini. Setelah pemilu 1971, Sekber Golkar melakukan reorganisasi dan namanya secara formal disingkat menjadi Golkar. Dan pada saat itu juga struktur dan komposisi Golkar yang baru terbentuk, yang terdiri dari sebuah Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang merupakan badan eksekutifnya, dan ketua umumnya adalah Mayjen Sokowati. Pada Munas 1973, struktur Golkar mengalami perubahan, yang mana. Dewan Pimpinan sebagai badan eksekutifnya. Dewan Pimpinan ini terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP),

⁶⁴ Leo Surya Dinata, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, 145

Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD tkt 1), dan Dewan Pimpinan Dati II, dan ketua umumnya pada saat itu masih di ketuai oleh Mayjen Sokowati. Selanjutnya kepemimpinan Golkar di masa Orde Baru diteruskan oleh Amir Murton, SH (1978-1983), Sudharmono, SH. (1983-1988), Wahono (1988-1993) dan Harmoko (1993-1998). Dimana sebagai ketua dewan pembina Golkar pada masa Orde Baru itu selalu di jabat oleh Soeharto, yang notabene merupakan presiden pada saat itu.⁶⁵

Di masa Orde Baru, ada tiga pilar kekuatan Golkar, dikenal dengan jalur ABG, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrasi, dan Golongan Karya. Anggota ABRI, walau tidak ikut memilih dalam pemilu, adalah kekuatan utama. Golkar. Seluruh anggota Korpri atau pegawai negeri, otomatis menjadi anggota Golkar. Jalur “G” terdiri atas tiga kelompok induk organisasi, yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).⁶⁶

Memasuki era reformasi, ketika rezim Orde Baru tumbang, banyak kalangan yang memprediksikan bakal runtuhnya Golkar bersama rezim yang menjadi patron politiknya. Berbagai macam tekanan politik pun dialamatkan kepadanya. Pada waktu itu Golkar di ambang kehancuran dan diprediksikan akan lenyap. Golkar menghadapi hujatan politik yang begitu dahsyat, termasuk ada yang menginginkan agar Golkar dilarang. Tantangan lain yang dihadapi Golkar pada era Reformasi

⁶⁵ *Ibid.*, 51-56

⁶⁶ SINDO, *Ada Apa Dengan Partai Golkar?*, 15 September 2008

adalah kuatnya tekanan eksternal yang menghendaki pembubaran Golkar. Sebagai tulang punggung kekuasaan Orde Baru, Golkar menjadi sasaran kemarahan dari kelompok-kelompok masyarakat terutama yang merasa dirugikan oleh sistem yang dikembangkan selama Orde Baru. Mereka menuntut agar Golkar dibubarkan atau minimal tidak diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum.⁶⁷

Runtuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun tentu saja berimbas kepada semakin terpuruknya citra Golkar yang menjadi pendukung utama dan setia rezim tersebut. Citra negatif yang diberikan publik seiring dikaitkan dengan karakteristik; bahwa Golkar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rezim Orde Baru, Golkar eksis dan besar karena kepemimpinan Soeharto, Golkar merupakan partai yang mendukung dan menumbuhkan suburkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, Golkar menggunakan politik uang di dalam setiap kegiatan politiknya dan GOLKAR kurang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang mendukungnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi perolehan suara Golkar pada pemilu di era Reformasi.⁶⁸

Pada Munas 1998, Golkar merubah dirinya menjadi Partai Politik dengan paradigma baru, yang bertujuan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Golkar baru bersifat reformis yang berbeda. dengan Golkar lama dan memandang demokrasi suatu keniscayaan dengan visi barunya, yaitu: 1. Terbuka, .2. Mandiri, 3.

⁶⁷ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 86

⁶⁸ Aulia Rachman, *Citra Khalayak Tentang Golkar:Peta Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004*, (Jakarta: PSAP 2006), 2

Demokratis, 4. Moderat, 6. Mengakar dan Responsif.⁶⁹ Munaslub Golkar 1998 memberikan ruang wacana bagi berkembangnya konsep paradigma baru sebagai respons Golkar yang mendasar terhadap perkembangan politik yang terjadi di era reformasi. Konsep paradigma baru tersebut dilontarkan oleh Akbar Tandjung dalam penyampaian visi misinya sebagai kandidat ketua umum DPP Golkar dalam Munaslub tersebut. Inti dari paradigma baru tersebut adalah mengharapkan Golkar dibangun dengan nilai-nilai baru selaras dengan tuntutan reformasi, dan menjadikan dirinya sebagai partai politik yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid, mengakar dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa, dan Negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten.⁷⁰

Pada masa kepemimpinan Akbar Tanjung inilah partai Golkar banyak diuji. Dengan strategi politik yang dimilikinya Partai Golkar tetap eksis di panggung politik Indonesia. Dalam keadaan tertatih, remuk dan langkah yang terseret karena kaki tergelayuti beban sejarah yang berat, di bawah Kepemimpinan Akbar Tandjung Golkar sebisa-bisanya berusaha mempertahankan eksistensinya dalam pemilu 1999.⁷¹ Perkiraan Golkar akan segera habis setelah lengsernya Pak Harto ternyata meleset. Perjuangan Akbar Tandjung dan kelompoknya telah membawa Partai Golkar menjadi pemenang kedua pada Pemilu 1999 setelah PDIP. Partai Golkar

⁶⁹ *Ibid*, 9-10

⁷⁰ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, 198

⁷¹ Kholid Novianto, dkk, *Akbar Tandjung Dan Partai Golkar Era Reformasi*, (Jakarta: Sejati Press, 2004), vii

memperoleh 23.741.758 suara (22,44%) sehingga menduduki 120 kursi DPR. Berhasil menempati urutan kedua setelah PDI-P yang memperoleh 33% suara. Dengan komposisi itu, berarti Partai Golkar telah melewati masa kritis yang dialaminya.⁷²

Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung berusaha membenahi diri dan tetap eksis. Di situlah partai ini harus mengalami tempaan paling berat. Dua persoalan berat yang harus dihadapi. Pertama, Akbar Tandjung harus berani mengemudikan partai secara benar agar mampu keluar dari stigma Orde Baru. Problem ini sungguh sulit karena Akbar Tandjung harus melakukan reposisi internal secara menyeluruh. Mengubah haluan partai di tengah resistensi kekuatan lama dan ketiadaan prospek sehubungan tingginya kemarahan publik. Kedua, merencanakan perubahan itu secara *eksternal* kendatipun sebagian besar kalangan tidak mempercayainya. Bahkan memusuhinya secara sengit. Sudah dapat dibayangkan, apapun langkah Akbar Tandjung menjadi serba sulit. Secara internal dia harus berhadapan dengan kekuatan lama yang menghendaki perubahan yang paling minim. Pada saat yang sama, secara eksternal, dia harus menghadapi intimidasi, provokasi, teror, dan aneka bentuk tekanan lainnya yang berusaha menghancurkan dirinya dan partainya.⁷³

⁷² H. Saifullah Yusuf, Belajar Pada Golkar, 2003(<http://www.polarhome.com/pipermadlnavonal-m/2003>), diakses pada 20 Oktober 2008

⁷³ Kholid Novianti,dkk. *Akbar Tandjung Dan Partai Golkar Era Reformasi*, vii

Namun di tengah begitu banyaknya partai politik pada pemilu 1999 dan 2004, mesin politik Golkar relatif jauh lebih baik di banding Parpol-Parpol lain. Ini terbukti ketika partai Golkar kembali mengikuti pemilu 2004, yang menempatkannya pada urutan pertama di dalam perolehan suara (21,58%). Dan menempatkan kembali Golkar menjadi partai besar di Indonesia.⁷⁴

C. Arah Ideologi Politik Partai Golkar

Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dimana partai politik menjadi penghubung antara penguasa dan kuasa. Adanya partai politik membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui partai politik. Secara umum partai politik dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yang berusaha memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Pengertian partai politik dalam UU No. 31 Tahun 2002 pasal 1 (1) adalah : “Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”.⁷⁵

⁷⁴ Aulia Rahman, *Citra Khalayak Tentang Golkar: Peta Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004*, 25

⁷⁵ UU No. 31 Tahun 2002 pasal 1 (1)

Dalam pembangunan politik, Partai Golkar selalu berupaya untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan seluruh rakyat. Partai Golkar akan memperjuangkan terciptanya iklim politik yang menempatkan rakyat sebagai pemilik nyata kedaulatan, karena ideologi Partai Golkar itu sendiri adalah Pancasila. Dengan demikian arah pembangunan politik ditujukan untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan terbuka yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Arah perjuangan Partai Golkar berorientasi pada program atau pemecahan masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia secara dinamis. Arah Pokok-pokok Program Partai Golkar meliputi:

1. Mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan landasan wawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan kehidupan politik Indonesia yang demokratis yang diabdikan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.
3. Membangun hubungan luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional.
4. Memberdayakan rakyat di daerah dengan mendayagunakan otonomi daerah bagi pengembangan potensi daerah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

5. Meningkatkan daya saing ekonomi bangsa serta mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang diabdikan untuk memantapkan kehidupan rakyat Indonesia yang harmonis.
7. Menciptakan tata kehidupan publik yang mapan (*stable public order*) dengan mengembangkan ketertiban publik dengan meningkatkan pembangunan sistem hukum nasional yang memenuhi kebutuhan, peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum menjadi organ yang profesional, bersih, dan berwibawa.

Partai Golkar mengarahkan seluruh perjuangannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia dalam 5 (lima) aspek kehidupan yaitu:

1. Dalam Ideologi

Partai Golkar akan tetap dan terus konsisten menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan Pancasila dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai Golkar juga akan menata pelaksanaan pembangunan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan jiwa dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

2. Dalam Politik

Golkar mengarahkan arah politiknya demi terbangunnya kesejahteraan rakyat dengan nilai-nilai dan doktrin Pancasila yang sudah menjadi acuan dalam melaksanakan kesejahteraan rakyat.

3. Dalam Ekonomi

Golkar mengarahkan pembangunan ekonomi berdasarkan sumberdaya ekonomi nasional, memanfaatkan globalisasi dan menangkal dampak negatifnya, menjunjung tinggi kaidah-kaidah perekonomian dunia, bagi terciptanya kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Atas prinsip tersebut Partai Golkar akan menggunakan strategi *double track* yaitu ekonomi rakyat pada downstream dan sistem ekonomi pasar sebagai *upstream*. Mengedepankan pembangunan ekonomi rakyat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam bentuk sistem perekonomian rakyat yang dilaksanakan dengan memberdayakan sepenuhnya kemampuan masyarakat luas serta mendayagunakan sumberdaya alam lingkungan sebagai basis kekuatan perekonomian negara.

4. Dalam Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya yang diharapkan terwujud adalah terciptanya kondisi masyarakat yang memberikan penghargaan terhadap profesionalisme (karya dan kekayaan) yang menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai-nilai

agama. Sebagai bangsa yang majemuk, Partai Golkar berkeyakinan untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa agar menjadi bangsa yang kuat (*strong nation*) dan mulia dengan ciri masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin yang tangguh, dan etika yang terpuji.

5. Dalam Pertahanan dan Keamanan

Partai Golkar berjuang untuk mewujudkan kondisi pertahanan dan keamanan yang menempatkan ketahanan bangsa sebagai basis pertahanan dan keamanan negara yang tujuannya adalah mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu Partai Golkar akan membangun unsur-unsur ketahanan bangsa yaitu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan hankam sendiri secara bersama-sama dan seimbang. Pembangunan aspek pertahanan dan keamanan ditujukan untuk mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan pada wawasan kebangsaan.

D. Paradigma Baru Partai Golkar

Upaya Golkar dalam melakukan penyesuaian diri terhadap reformasi adalah melakukan revitalisasi nilai-nilai dasar dan perubahan paradigma. Reformasi tidak hanya menyangkut unsur perubahan struktur politik, tetapi juga membawa nilai-nilai baru, seperti tuntutan demokratisasi, partisipasi politik, transparansi, dan keadilan sosial, yang kesemuanya ini menjadi tantangan serius bagi Partai Golkar. Sebagai organisasi politik yang menyandang stigma baru akibat kedekatannya dengan Orde Baru, yang banyak mendapat hujatan di era reformasi, jika ingin bertahan Golkar harus mampu merespon perubahan nilai dan tatanan dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia.⁷⁶

Reformasi politik yang Sering ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, selain membawa perubahan di berbagai aspek dalam pemerintahan, juga mengubah nilai-nilai lama dan munculnya nilai-nilai baru. Menguatnya aspirasi demokratisasi, reformasi di segala bidang kehidupan, keterbukaan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta pentingnya partisipasi masyarakat merupakan sebagian dari nilai-nilai baru tersebut. Transisi demokrasi

⁷⁶ Akbar Tandjung, (Ed. Hajriyanto Y. Tohari), *Moratorium Politik: Menuju Rekonsiliasi Nasional*, Jakarta: Golkar Press 2003), 187.

telah pula menyebabkan berbagai nilai dan tatanan politik lama yang tidak demokratis menjadi tidak relevan lagi.

Berkembangnya nilai-nilai demokrasi ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi Partai Golkar, sebab merupakan fakta bahwa Golkar dalam sejarahnya merupakan bagian penting dari kekuasaan hegemonik Orde Baru yang otoriter dan anti demokrasi. Perubahan nilai-nilai ini pada awalnya disikapi secara beragam oleh elite Golkar. Hal ini sekurangnya terbukti dengan terjadinya fragmentasi yang kuat dan sikap pro-kontra dalam merespon reformasi. Beberapa pihak masih ingin mempertahankan nilai-nilai lama meskipun tidak demokratis, tetapi banyak juga yang dengan tegas menolak paradigma lama serta mendukung secara penuh reformasi yang sedang berjalan. Namun demikian, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam Golkar, yang berpuncak pada Munaslub 1998, kepemimpinan baru Golkar telah merumuskan visi dan perspektif yang lebih sejalan dengan nilai-nilai reformasi sebagaimana tercermin dalam konsep paradigma baru.⁷⁷

Perubahan paradigma dalam Golkar pasca reformasi tak terelakkan lagi, sebab struktur dan budaya politik lama (Orde Baru) yang berujung pada nepotisme, kolusi dan korupsi jelas-jelas tidak mendapat tempat di hati rakyat. Reformasi politik tahun 1998 telah mengakhiri hubungan patronase Golkar dengan kekuasaan. Pendek kata, Golkar perlu membangun jati dirinya yang baru dalam merespon berbagai perubahan masa transisi demokrasi. Untuk membangun kultur dan jati diri

⁷⁷ *Ibid.*, 189

baru inilah kepemimpinan Golkar tanpa ragu-ragu menetapkan berbagai kebijakan yang progresif dan reformis, sebagaimana dirumuskan dalam konsep paradigma baru.

78

1. Doktrin Perjuangan Partai Golkar

Dengan paradigma baru ini, doktrin Partai Golkar tetap sebagai kelanjutan dari Sekretariat Bersama (SEKBAR) golongan karya yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai Golkar tetap berpegang teguh pada doktrin Karya Kekaryaannya, yaitu karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Dengan Doktrin Karya Kekaryaannya, maka Partai Golkar selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi ajaran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai Golkar adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya. Dan dengan doktrin itu Partai Golkar berorientasi pada program dan atau pemecahan masalah, bukan berorientasi pada aliran atau ideologi.⁷⁹

Dengan perspektif ini Partai Golkar tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Karena hal itu dikhawatirkan akan melahirkan konflik ideologi yang bermuara pada

⁷⁸ *Ibid.*, 192

⁷⁹ Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, *Hasil Munas VIII Partai GOLKAR Tahun 2009*, (Pekan Baru-Riau: 2009), 60.

pertentangan, perpecahan, dan integritas bangsa. Oleh karena itu doktrin Partai Golkar ini senantiasa prihatin menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan tidak sehat di antara berbagai partai politik yang membawa terjadinya konflik dan pertentangan politik yang tajam. Masing-masing partai politik berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit, sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut, bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita proklamasi. Dalam suasana seperti itu Partai Golkar tampil dengan Doktrin Karya Kekaryaannya karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa.⁸⁰

2. Visi dan Misi Partai Golkar

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya. Partai Golkar berjuang

⁸⁰ *Ibid.*, 61

demokratis demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur, sejahtera dalam kehidupan masyarakat yang berakhlak baik, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, cinta tanah air dan lingkungan serta demokratis dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri.⁸¹

Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum yang harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Di bidang ekonomi visi Partai Golkar adalah ekonomi kerakyatan. Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional.⁸²

Dan dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut partai Golkar menegaskan perjuangannya dengan menegakan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh negara kesatuan republik Indonesia. Dalam rangka ,membawa misi tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:⁸³

- a. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

⁸¹ *Ibid.*, 62

⁸² *ibid.*, 63

⁸³ *Ibid.*, 64

- b. Melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi politik atau jabatan-jabatan publik
- c. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi, dan kritik dari masyarakat.⁸⁴

3. Platform Politik Partai Golkar

Platform adalah landasan tempat berpijak, yaitu wawasan yang menjadi acuan dan arah dari mana dan kemana perjuangan partai Golkar hendak bergerak. Partai Golkar berpijak pada landasan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka Partai Golkar berwawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu. Dan ini adalah cara pandang yang mengatasi golongan dan kelompok baik atas dasar agama, suku, etnis, maupun budaya. Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus dihimpun secara sinergis dan dikembangkannya sehingga menjadi kekuatan nasional yang kuat dan besar.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, 65

⁸⁵ *Ibid*,67

Dengan platform ini, maka partai Golkar terbuka bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, budaya, bahasa, agama,, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan partai Golkar diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam Rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi politik.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid.*, 68